

# ISLAM DAN SISTEM PEMERINTAHAN DALAM LINTASAN SEJARAH

**Saepullah S.**

Dosen Fak. Syariah UIN SMH Banten

## **Abstrak**

Kendati banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang Negara dan kemesyarakatan, namun itu dihadirkan dalam bentuk normatif. Sementara formulasi secara sistemik, tidak disajikan. Oleh karena itu logis andai muncul ragam pendapat seputar sistem dan bentuk Negara perspektif doktrin Islam, yang bermuara pada dua kutub soal: pertama, apakah wajib atau tidak membangun sistem pemerintrahan Islam dan kedua apakah kapasitas Muhmmad saw. sebagai pemimpin agama saja atau plus juga sebagai pemimpin Negara?

Persoalan yang terakhir mengemuka pasca wafat beliau. Namun pada akhirnya, para ulama nyaris bersepakat, bahwa kekuasaan itu memang harus ada. Karena ia merupakan bagian integral dari upaya memasyarakat sistem dan aturan Islam yang diamanatkan oleh Allah. Namun aktualisasi idiom kekuasaan tersebut, ada yang diformalkan dalam bentuk pemerintahan (Negara), ada yang tidak.

Anutan pertama yang diaktualkan dalam bentuk formal, yakni melalui sistem kekhilafahan yang pernah berjaya dengan teori Quraisnya hingga dinasti Turki Usmani, sebelum secara resmi dibubarkan oleh Musthafa Kemal Attatur pada tahun 1924. Sejak itulah sistem khilafah yang pernah menjadi primadona sistem pemerintahan Islam berakhir.

Islam dengan tawaran sisatem pemerintahan hasil ijtihad para pemikir muslim (baca: mujtahid) , telah tertulis dalam ritme lintasan kesejarahannya, dari mulai masa perkembangan, kejayaan hingga kehancurannya. Dalam nilai kesejarahan ini ada hal menarik yang ditawarkan kubu Khawarij, bahwa membentuk Negara atau sistem pemerintahan tidak mutlak harus dilakukan

oleh suku atau bangsa tertentu, melainkan oleh siapapun bisa sepanjang memiliki kesanggupan dan kemampuan yang mumpuni. Disamping itu, bentuk Negara atau pemerintahan berdasarkan Islam tidaklah prinsip. Yang paling prinsip adalah bagaimana aturan hukum dan rasa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks realitas, Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun atas konsensus nasional yang digagas dan dibangun oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*), Negara kita berdasarkan Pancasila, tidak berdasarkan Islam. Kendati secara terminologi tidak menganut hukum Islam, namun semangat dan nilai-nilai keislaman yang dipayungi oleh sila pertama-Ketuhanan Yang Maha Esa, terasa hidup. Spesial dalam konteks ini, kiranya sangat relevan dengan teori yang suguhkan kaum Khawarij tadi.

Kata Kunci : Islam, Pemerintahan, Sejarah

## A. Pendahuluan

Eksistensi pesan al-Qur'an merupakan barometer pertama dan paling utama ketika menentukan sebuah pembenaran. Sementara kehadiran al-Hadis hanya lapis kedua sebagai penguat dan pelebaran tafsir atas al-Qur'an ketika ditemukan daya tunjuknya belum jelas. Atas dasar pemikiran ini, Ali Hasballah memastikan, bahwa al-Qur'anlah satu-astunya sumber ajaran Islam.<sup>1</sup>

Pada tataran normatif dan atas dasar tilikan nilai ketransendentalannya, kita pun memposisikan al-Qur'an pada batas zona segala-galanya: ia bicara pada ranah sosial, ekonomi, politik, kenegaraan dan lain sebagainya. Salah satu faktanya, Allah menyatakan, bahwa Dia telah menyempurnakan Agama

---

<sup>1</sup> Lihat, Ali Hasballah, *Usul Al-Tasyri' Al-Islami*, ( Kairo : Dar Al-Ma'arif, 1964), hlm. 250

Islam sebagai nikmat yang paling besar<sup>2</sup>. Kata “menyempurnakan”, dapat dimaknai, bahwa Islam telah mengatur segalanya. Selanjutnya, Dia pun menegaskan, bahwa apapun bentuknya dari sistem kehidupan ini, tidak luput dari jangkaun aturan al-Qur’an,<sup>3</sup> dan ia (al-Qur’an) hadir adalah untuk menjelaskan segala sesuatu.<sup>4</sup> Dengan demikian, al-Qur’an memberi kepastian, bahwa segala mekanisme dan aturan sistem tata kehidupan seluruh makhluknya-lebih spesifik manusia sebagai komunitas yang berakal-telah ditentukan dalam al-Qur’an. Namun pada tataran riilnya, tidaklah berlebihan andai kita mengajukan sebuah pertanyaan, “apakah semua itu realistis adanya”?

Dalil pembenaran yang dikontruksi dari ayat di atas, sesungguhnya bersifat normatif. Hal ini dituturkan oleh para pakar tafsir ternama. Kata “menyempurnakan agama”, versi tafsir Ibn Katsir bukanlah agama *an sich*, melainkan yang dimaksud adalah iman (sistem kepercayaan),<sup>5</sup> versi Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan “*din*” adalah seperangkat kewajiban, hukum, perintah dan larangan<sup>6</sup>. Sementara versi al-Zamakhshari yang dimaksud “menyempurnakan” adalah “melindungi”, yakni “Aku melindungimu dari gangguan musuh, sehingga kamu memperoleh kemenangan dan pihak musuh menelan kekalahan”.<sup>7</sup> Al-Qur’an, surat al-An’am ayat 38, “*Dan tidak ada binatang di bumi dan juga tidak ada burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali hidup berkelompok sebagai kamu: Tidak Kami lupakan sesuatu apapun yang di dalam Kitab itu,*

---

<sup>2</sup> Al-Qur’an, surat al-Maidah ayat 3, “ Hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu, Aku lengkapi nikmat-Ku untuk kamu dan Aku rela Islam sebagai agamamu”.

<sup>3</sup> Al-Qur’an, surat al-An’am ayat 38, “*Tidak kami lupakan sesuatu apa pun dalam kitab* .

<sup>4</sup> Al-Qur’an surat al-Nahl ayat 89, “*Kami turunkan kitab itu kepadamu untuk menjelaskan segala-galanya*”

<sup>5</sup> Lihat, Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim*, vol II, (Mesir : Dar al-Fkr, t.t), hlm. 12.

<sup>6</sup> Lihat, Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, vol IV, (Mesir : Dar al-Qalam, t.t ), hlm. 156

<sup>7</sup> Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf*, vol I, (Bairut : Dar al-‘Ilm, t.t.), hlm. 404

*semuanya akan dikumpulkan dalam kembali dengan Tuhan mereka”.*

Ungkapan, “Tidak Kami melupakan sesuatu apapun dalam kitab itu”, versi Ibn Katsir ayat ini secara spesifik berbicara tentang betapa Allah Maha Peduli dan Maha Perawat atas seluruh makhluk-Nya. Tidak satu pun yang diabaikan, melainkan semuanya diberi rizki oleh-Nya, baik yang berada di bumi, maupun di langit <sup>8</sup>. Adapun kata “al-kitab” (dalam kalimat di atas-“*Tidak Kami melupakan sesuatu apapun dalam kitab itu*”-, very al-Zamahsyari, bahwa yang dimaksud denganya (al-kitab) bukanlah al-Qur’an yang ada di bumi, melainkan *Lauhu al-Mahfûzh* yang ada di langit, dimana ia menjadi sumber dari al-Qur’an itu sendiri. Dengan demikian, *al-Lauhu al-Mahfûzh* adalah sumber segala-galanya, bukan Al-Qur’an. <sup>9</sup>

Namun khusus dalam konteks hukum sosial kemasyarakatan (*al-Ahkāmu al-Mu’āmalah*), al-Qur’an bicara dalam porsi yang relatif spesifik. Adalah Abdul Wahab Khalaf guru besar hukum Islam di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir, menginventarisir ayat al-Qur’an yang bicara pada segmen tersebut (*al-Ahkāmu al-Mu’āmalah*), ke dalam tujuh kelompok, yaitu: (1) *Keluarga*: perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya, 70 ayat, (2) *Dagang*: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam gadai, perseroan, kontrak dan sebagainya, 70 ayat, (3) *Soal Kriminal*, 30 ayat, (4) *Hubungan Islam – bukan Islam*, 25 ayat, (5) *Hukum Acara* 13 ayat, (6) *Hubungan Sosial-antar kaya* 7 ayat dan antar miskin 10 ayat dan (7) *Kenegaraan* 20 ayat. <sup>10</sup> Sedang Muhammad Izzah Darwazah, menginventarisirnya ke dalam tiga kelompok, yaitu : (1) *Soal Negara*, (2) *Soal sosial* dan (3) *Soal individu manusia*. *Soal Negara*, meliputi ayat-ayat yang bicara ihwal keuangan, hukum, peperangan dan agama. *Soal Sosial*, meliputi ayat-ayat yang berkait tentang jaminan sosial, kebebasan, persaudaraan serta persamaan manusia dan kehidupan

---

<sup>8</sup> Ibn Katsir, *Ibid*, hlm. 131

<sup>9</sup> Al-Zamahsyari, *Ibid*, 582

<sup>10</sup> Lihat, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushu al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), hlm.34-35

keluarga. *Soal Pribadi*, meliputi ayat-ayat tentang pembinaan budi pekerti luhur dan pembinaan muslim yang baik.<sup>11</sup>

Singkatnya al-Qur'an ketika bicara soal sosial kemasyarakatan (*al-Ahkāmu al-Mu'āmalah*), tidak runtut dan sistematis, melainkan lebih ke pola-pola umum (standar umum). Selanjutnya dalam eksekusi teknis di lapangan, lebih didominasi oleh formula-formula baru hasil desain ijtihad masing-masing. Tulisan yang sederhana ini, akan mencoba membahas tentang dinamika pemerintahan, yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah judul Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Lintasan Sejarah.

## **B. Polemik Seputar Eksistensi Muhammad saw. dalam Konteks Kepemimpinan dan Kekuasaan.**

Sebagaimana telah disinggung di atas, kendati dua tokoh pakar hukum Islam-Azzah Darwajah dan Abdul Wahab Khalaf-, menginventarisir sejumlah ayat yang bicara soal kenegaraan, namun perlu ditegaskan, bahwa ayat tersebut secara spesifik tidak berbicara dan menjelaskan ihwal sistem pemerintahan atau formulasi bentuk Negara dalam Islam. Secara tegas Azzah menyatakan, bahwa dalam al-Qur'an tidak ada konsep dan bentuk Negara.<sup>12</sup> Doktrin Islam, baik yang terkemas dalam al-Qur'an, maupun al-Hadis, lebih intens bicara pada tema-tema dan prinsip-prinsip umum, ketimbang aspek-aspek tertentu yang rinci (*Qoth'iiyyatu al-Dilālah*). Hal ini tidak lain untuk menunjukkan, bahwa di satu pihak doktrin Islam adalah original dan bermuatan *rahmatan lil 'alamin*, sedang di pihak lain ia (doktrin Islam), memahami dan merespon dinamikan perubahan dan perkembangan masyarakat sesuai dengan fakta realita situasi dan kondisi yang terjadi.<sup>13</sup>

Bagi yang berpandangan seperti di atas, bahwa mendirikan sistem pemerintahan dan bentuk Negara Islam,

---

<sup>11</sup>Lihat, Azzah Darwajah, *Al-Dustūr al-Qur'ani Fī Syu'ūn al-Hayyah*, (Kairo : Dar al-'Ilm, 1956), hlm. 34-35

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 86

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 89

bukanlah sebuah keharusan. Adalah Hatim al-Asam, seorang zahid dari kubu Mu'tazilah yang hidup pada abad ke-3 H. , ia berpendapat bahwa yang terpenting adalah tegaknya peraturan dan hukum serta keadilan di masyarakat. Andai semua itu telah berjalan dengan baik, apa perlunya membentuk pemerintahan. Pendapat senada juga diamini oleh komunitas *al-Muhakkimah* dan *al-Najdah* dari sekte Khawarij.

Adalah Ali Abd al-Raziq seorang ulama al-Azhar pemula abad ke 20, ketika beranggapan, bahwa tidak adanya ayat spesifik yang mewajibkan membentuk pemerintahan, ia memandang bahwa tugas Muhammad saw. tidak lain hanya seorang rasul seperti halnya rasul-rasul yang lain pada umumnya, yang bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan , tidak untuk membentuk pemerintahan atau kerajaan.<sup>14</sup> Memang pada sisi lain ia (Ali Abd al-Raziq) tidak memungkiri, bahwa beliau dalam kasus-kasus tertentu adakalanya mengeluarkan kebijakan, yang lazimnya dilakukan seorang pemerintah , misalnya menaklukan suku-suku bangsa Arab, bahkan melebar ke Bizantium dan Persia.<sup>15</sup> Namun menurutnya, itu sangat insidental dan dalam sekala yang sangat sederhana.<sup>16</sup> Beliau memang memiliki kekuasaan, namun itu bersifat umum,<sup>17</sup> mencakup soal dunia dan akhirat.<sup>18</sup> Typelogi kepemimpinan dan kekuasaan Muhammad saw., tidak lebih hanyalah kepemimpinan dan kekuasaan seorang 'Rasul' semata, bukan lazimnya seperti kepemimpinan dan kekuasaan seorang raja atau presiden, yang kadang bersikap otoriter dan memaksa rakyatnya.<sup>19</sup> Beliau diwanti-wanti oleh Allah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an harus bersikap lemah lembut, tidak bersikap kasar dan dalam berdakwah tidak boleh memaksa orang.<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup>Lihat, Azzah Darwajah, *Al-Ilam wa Usul Al-Hukum*, (Kairo : Isa al-bab al-Halabi, 1925), hlm. 64-65

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 63

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 68

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 29

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 72

Namun di luar Abd al-Raziq, para ulama lain memiliki pandangan yang berbeda, bahwa Muhammad saw. disamping beliau sebagai “rasul” yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan kewahyuan dari Allah, beliau juga adalah seorang kepala Negara yang pusat pemerintahannya di Madinah. Sebagai bukti bahwa beliau adalah sebagai kepala Negara, muncul para penggantinya pasca beliau meninggal dunia. Tercatat sebagai penerus kekuasaannya (*al-Khulafāu al-Rāsyidūn*) yaitu:, Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya secara estapeta diteruskan oleh raja-raja dinasti Bani Umayyah, Abbassiyah dan hingga sultan-sultan Turki Usmani. Adapun argumen yang dibangun oleh mereka, adalah atas dasar “ijma”, konsensus para sahabat yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya.

### **C. Dominasi Teori Quraisy dan Kebijakan Mustafa Kemal Attaturk**

Secara tegas dan pasti, Rasul saw. menjelang wafatnya, tidak menunjuk siapa sesungguhnya yang paling berhak untuk memangku jabatan khalifah (pengganti beliau). Atas dasar inilah, logis andai dikemudian hari pasca beliau wafat, muncul berbagai klaim. Kaum Anshar mengklaim, bahwa yang paling pantas dan berhak untuk memangku jabatan khalifah pasca Rasul saw. wafat adalah dari kubu mereka. Pasalnya, kaum Ansharlah yang paling berjasa dalam menyambut, menghormat dan membantu tugas-tugas dakwah beliau selama di Madinah. Tanpa adanya partisipasi dan uluran tangan kaum Anshar, dakwah beliau tidak akan sukses. Kaum Muhajirin mengklaim, bahwa yang pantas dan berhak untuk memangku jabatan khalifah-pengganti Rasul saw. pasca beliau wafat adalah dari kubu mereka-golongan Quraisy. Pasalnya, mereka merasa paling berjasa dalam proses safari hijrah beliau dari Makah ke Madinah yang sarat dengan tantangan itu. Andai tidak ada keterlibatan kaum Muhajarin yang membantu proses hijrah tersebut, dipastikan perjuangan Rasul saw. akan berakhir dengan kegagalan. Sementara dari kubu

keluarga Rasul saw. juga mengklaim, bahwa yang paling pantas dan paling berhak untuk bertindak selaku khalifah-pengganti beliau pasca wafatnya-adalah dari kubu keluarga beliau sendiri, dalam hal ini adalah Ali Ibn Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan sekaligus mantu beliau sendiri (suami Fatimah). Gilirin terakhir dari kaum Khawarij, mereka berpendapat, bahwa yang pantas dan berhak untuk menjadi khalifah-pengganti beliau pasca wafat-tidak mesti dari kubu Anshar, atau Muhajirin dan bahkan dari kubu keluarga Rasul saw-golongan . sendiri, siapapun-di luar bangsa Arab sekalipun- boleh, sepanjang memiliki kesanggupan (memenuhi syarat).

Sejarah mencatat, bahwa dalam proses persaingan politik tersebut, yang keluar sebagai pemenang adalah kubu kaum muhajirin yang didominasi kau Quriasy. Oleh karena itu, maka tidaklah heran andai mereka (kaum Quraiys) mendominasi sistem kekuasaan, dari mulai khalifah pertama pada permulaan abad ke-7 sampai khalifah terakhir Bani Abbas pada pertengahan abad ke-13 M. Tidak hanya sampai di situ, pasca hancurnya dinasti Abbas, Sultan Mamluk Baybar di Mesir pada tahun 1216 membawa salah seorang anggota keluarga Bani Abbas ke Kairo untuk menjadi khalifah pengganti khalifah yang dibunuh Hulago di Baghdad pada tahun 1258 M, dan timbullah satu rentetan khalifah baru, yang juga berasal dari golongan Quraisy di Mesir.

Rentetan alur kekuasaan, tidak mungkin survival, dan pada gilirannya akan dieksekusi oleh dialektika proses alamiah juga. Wujudnya, dinasti Mamluk sebagai pembawa panji kebesaran dinasti Abasiyah yang didominasi kalangan Quraisy penatik, akhirnya pada tahun 1517 ia dihancurkan oleh Sultan Salim dari kerajaan Turki Usmani. Dominasi khalifah dari kalangan Quraisy, berakhir sudah, selanjutnya diganti dan dijabat Sultan-sultan Turki Usmani sendiri, dengan menganut teori Khawarij. Selanjutnya pada tahun 1924 sisistem khilafah tersebut di Turki , dihapuskan oleh Musthafa Kamal. Sejak itulah terminologi khilafah berakhir di di dunia Islam.



#### **D. Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Lintasan Sejarah**

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa secara tegas dan spesifik al-Qur'an tidak bicara soal bagaimana bentuk Negara atau pemerintahan versi doktrin Islam. Namun pada tataran riil di lapangan, bahwa kehadiran sistem Negara dan pemerintahan versi doktrin Islam realistik adanya. Khuda Bakhs,<sup>21</sup> dalam menguraikan soal politik dalam Islam berdasarkan atas tulisan Von Kramer, Welhausen, Goldziher dan lain-lain, menulis bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk suatu pemerintahan yang berbentuk teokratis, yang puncaknya berdiri seorang wakil Tuhan di permukaan bumi.<sup>22</sup>

Dari kalangan para penulis non muslim seperti W. Montgomery Watt juga berpendapat, bahwa kehadiran Nabi Muhammad saw. disamping berkapasitas sebagai "rasul"-pesuruh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kewahyuan-Nya-juga berkapasitas sebagai Kepala Negara. Masyarakat yang beliau bentuk dan bina di Madinah, bukanlah kalangan agama saja, tapi juga kalangan politik yang berasal dari kesekutuan suku-suku bangsa Arab, dimana pada tahun 632 M. Nabi Muhammad sebagai pemimpin (kepala Negara)nya. Bentuk persekutuan suku-suku bangsa Arab tersebut, pada dasarnya adalah representasi rakyat Madinah.<sup>23</sup>

Philip K. Hitti menulis, bahwa dari masyarakat keagamaan Madinah terbentuklah suatu Negara yang lebih besar. Untuk pertama kali dalam sejarah terbentuklah suatu masyarakat yang mempunyai agama, dan bukan darah sebagai dasar. Di atas puncak Negara ini berdiri Tuhan. Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan dan penguasa tertinggi di permukaan bumi. Di samping tugas kerasulannya, Nabi Muhammad juga memiliki kekuasaan

---

<sup>21</sup> Salah Al-Din Khuda Bakha, *Politics In Islam* ( Lahore : Ashraf, 1954), hlm. 1

<sup>22</sup> *Loc.cit.*,.

<sup>23</sup> *Ibid.*,223

dunia sama dengan kepala Negara biasa.<sup>24</sup> Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian mencakup sebagian terbesar dan Asia Barat dan Afrika Utara.<sup>25</sup>

Para penulis umumnya menyebut, bahwa Negara bentukan beliau tersebut berdasarkan teoraksi yakni atas dasar kedaulatan Tuhan. Pada kapasitas ini, beliau menjalankan roda pemerintahannya, bukan semata atas dasar kebijakan logika ijtihadnya, melainkan atas dasar kebijakan wahyu dari Allah. Karena atas dasar kebijakan terakhir inilah, beliau *makshum* (bisa terhindar dari kesalahan).

Pasca pergeseran kepemimpinan dari Rasul saw. yang selanjutnya berpindah ke tangan para khalifah, terjadilah perubahan-perubahan mendasar. Yang semula berbentuk teokratis berbasis kedaulatan Tuhan, kini bergeser ke bentuk non teokratis, dimana forsi akal dalam menggulirkan berbagai bola kebijakan lebih dominan. Namun demikian, semangat merujuk kepada kebijakan syari'ah yang diaktualkan dalam bentuk musyawarah mufakat ketika mengambil kebijakan, juga menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, para penulis politik dalam Islam, menilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh khilifah yang empat-Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah paling ideal. Bahkan versi para pemikir pembaharuan dalam Islam pada abad ke-19 dan abad ke-20, bahwa paktor utama yang menyebabkan kemunduruan umat Islam, karena lenyapnya khalifah yang empat dari dunia Islam yang bercorak republik yang demokratis.

Asghar 'Ali menyebutnya "Republik" Islam.<sup>26</sup> Senada dengan Ashgar, Fadhil Zaky Muhammad menulis, bahwa jika sistem pemerintahan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa modern, dapat dikatakan bahwa sistem khilafah banyak mempunyai persamaan dengan republikanisme. Mengingat, ketika menentukan kepala Negara, dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat dan dalam waktu bersamaan kepada

---

<sup>24</sup> Lihat, Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, ( London, 1964, ), hlm. 120

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 51.

Negara juga bertanggung jawab kepada rakyat. Sementara perbedaan antara keduanya, hanya terletak jabatan kekuasaan. Dalam sistem khalifah, kepala Negara tetap memegang jabatan selama ia tunduk kepada syari'ah, sedang dalam sistem republikenisme kepala Negara menjabat hanya untuk waktu yang ditentukan.<sup>27</sup> Terhadap khalifah empat besar-Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, K. Hitti, menyebutnya sebagai periode republik.<sup>28</sup>

Khawaja Nazir Ahmad, menilai bahwa pemerintahan Islam sampai pada batas puncak perkembangannya ketika dipimpin oleh khalifah kedua-Umar Ib al-Khatib. Ia mampu membangun pemerintahan yang sosialis yang dasar-dasarnya telah diletakkan Nabi Muhammad.<sup>29</sup> Faktanya, Umar tidak membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang kepada para prajurit, melainkan ia dijadikan sebagai kas Negara (Baitu al-Mal), yang dialokasikan untuk kepentingan umum, kendati hal ini versi Khuda Bakh, tidak menyangkan orang-orang Arab..<sup>30</sup>

Andai para penulis di atas memotret sistem khalifah hanya dari satu sisi, sementara yang lain memotretnya secara keseluruhan. Toha Hussein berpendapat bahwa sistem khalifah tidak identik dengan teokrasi, absolut, demokrasi, monarki atau republik, tetapi yang disebut sistem khalifah manakala ia terbangun atas dasar syari'at Islam, dimana komunitas pendukungnya (umat Islam) sebagai pengamalnya.<sup>31</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh H.D al-Rayes, bahwa khilafah tidak identik dengan teokrasi, mengingat kedaulatan bukanlah di tangan orang-orang beragama, tidak identik dengan nomokrasi, mengingat undang-undangan bukan satu-satunya yang berperan dalam sistem pemerintahan dan tidak pula identik dengan demokrasi mengingat rakyat tidak mempunyai kedaulatan absolut. Dalam khilafah, yang memegang

---

<sup>27</sup> Philip. Hitti, *ibid*, hlm. 183

<sup>28</sup> *Ibid*, 185

<sup>29</sup> Abu Ala Al-Maududi, *Islam and Socialism*, (Lahore : Working The Basher Muslim Library, t.t), hlm. 7

<sup>30</sup> Khuda Bakha, *ibid.*, 20-21

<sup>31</sup> *Ibid.*, 297

kedaulatan adalah “sistem”, sehingga terlihat “unik” yang berbeda dengan sistem yang lain..<sup>32</sup>

Khalifah kelima, Mu’awiyah Ibn ‘Abi Sufyan Ibn Harb Ibn ‘Umayyah (661-680). Sistem pengangkatan khalifah sangat berbeda dengan yang berlaku pada khalifah empat besar yang sebelumnya. Pada priode ini pengangkatan khalifah berdasarakan sistem dinasti turun temurun, sehingga akhirnya mengemuka terminologi “Dinasti Mu’awiyah”.

Pada konteks ini terjadi perubahan sistem. Andi pada pemerintahan khalifah empat besar menganut sistem republik dan demokratis, sementara pada pemerintahan Mu’awiyah menganut sistem monarki. Anutan terhadap sistem monarki ini, berdampak pada gaya kepemimpinan menjadi absolut dan otoriter , sehingga prinsip musyawarah nyaris terabaikan. Kendati demikian, keabsolutan dan keotoriterannya tidak terlalu menonjol, karena masih dipengaruhi oleh demokrasi Arab. Berbeda dengan dinasti Bani Abas yang berpusat di Baghdad dimana pemuka-pemuknya lebih didominasi oleh darah Persi, karakter keabsolutan dan keotortrannya lebih menonjol. Sebagai reaksi terhadap pengaruh Persia ini, Abu Yusuf, Hakim Baghdad pada 872 M menulis kitab *al-Kharaj* yang mengandung protes terhadap penyusaian prinsip-prinsip Islam dengan pengaruh-pengaruh Sasan (Persia).

Untuk mem-back uf teori dan praktek keabsolutannya, sebagaimana diungkapkan oleh W. Montgomery Watt, Bani Umayyah melakukan inovasi interpretasi terhadap idiom khalifah . Andai semula secara spesifik dikaitkan dengan sebutan *Khalifaturrasul* –pengganti Rasul saw.-sekarang diganti dengan idiom *Khalifatullah*-wakil Allah.<sup>33</sup> Lebih ekstrim dari Bani Umuyyah , untuk melegitimasi kekuasaannya yang absolut, Bani Abbas menggantinya dengan sebutan “*Zhillullah fi ardhiih*”, (bayangan Tuhan di permukaan bumi).<sup>34</sup> Kata-kata ini

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 309

<sup>33</sup> Asghar Ali, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh, 1968), hlm. 33

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 34

mengandung arti bahwa khalifah memperoleh kekuasaannya dari Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan mutlak.

Kekuatan absolut Bani Abbas segera ditantang oleh berdirinya dinasti-dinasti kecil di bagian-bagian ibu kota, seperti dinasti 'Idris (788-974) di Marokko, Dinasti 'Aghlabi (800-909) di Tunis, Dinasti Bani Tulun (868-905) di Mesir, Dinasti Thahiri (820-872) di Khurasan, yang kemudian digantikan oleh Dinasti Saffari (867-908) dan Dinasti Samani (874-909) di Transoxania. Dinasti-dinasti kecil ini, tidak lama kemudia diikuti oleh Dinasti yang benar, seperti Dinasti Ghaznawi (962-1185) di Afghanistan dan Punjab di India. Raja yang termasyhur dari dinasti ini, Mahmud Ghaznawi (999-1030) diberi khalifah di Baghdad gelar sultan. Kalau dinasti Ghaznawi berkuasa di daerah yang jauh dari Baghdad, Dinasti Buwayhi (945-1055) yang beraliran Syi'ah dan berkuasa di daerah Persia masuk ke Baghdad dan menguasai Ibu kota. Raja-raja Buwayhi ini juga diberi gelar Sultan, sehingga di Baghdad terdapat dua penguasa, khalifah yang memegang kekuasaan mempunyai sifat kedudukan dan Sultan yang memegang kekuasaan keduniaan. Dinasti yang beraliran Syi'ah ini kemudian dikalahkan oleh Dinasti Saljuk (1055-1194)) dari Turkistan yang beraliran Sunni. Sultan Syi'ah diganti oleh Sultan Sunni di Baghdad.

Kekuasaan absolut khalifah di Baghdad sebenarnya ditandingi bukan hanya oleh Sultan-sultan di daerah atau pun di Baghdad sendiri yang masih mengakui khalifah sungguhpun dalam nama, sebagai penguasa tertinggi yang mempunyai sifat kekudusan. Khalifah di Bani Abbas juga ditandingi oleh khalifah lain. Khalifah Bani Umayyah (929-1031) di Andalus (Spanyol Islam) dan khalifah Bani Fatimah (909-1171) di Tunis dan kemudian di Mesir. Khalifah di Andalus beraliran Sunni dan khalifah di Mesir beraliran Syi'ah.

Sesudah kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad dihancurkan Hulago di tahun 1258 dan kemudian muncul di sejarah kekhalifahan Turki di Istambul, keadaan dunia Islam sama dengan keadaan di waktu kekhalifahan Bani Abbas. Di daerah-

daerah yang jauh dari Istambul terdapat Sultan-sultan, anatara lain Indonesia, yang mengakui khalifah di Istambul sebagai penguasa tertinggi yang mempunyai sifat kekudusan, Sultan-sultan itu mempunyai kekuasaan yang absolut di daerah masing-masing. Bedanya kalau hanya raja-raja Bani Abbas hanya mempunyai gelar khalifah. Raja-raja Turki Usmani di samping gelar khalifah mempunyai gelar Sultan. Kekuasaan khalifah yang mempunyai sifat kekudusan dan kekuasaan keduniaan Sultan berada di satu tangan, bukan dua orang sebagai di zaman Bani Abbas.

Jadi setelah wafatnya khalifah keempat pada tahun 661 M, pemerintahan di dunia Islam seluruhnya, baik di pusat maupun di daerah bercorak monarki absolut. Suasana inilah yang terdapat ketika pengaruh kebudayaan Barat masuk ke dunia Islam pada abad ke-19. Dalam bidang politik pada mulanya paham konstitusi dan kemudian paham republik mempunyai pengaruh pada pemikir-pemikir pembaharuan dalam Islam. Timbulah di dunia Islam gerakan yang disebut gerakan konstitualisme.

Rife'ah Badawi Rafi'i al-thahthawi (1801-1873) seorang Syeikh dari al-azhar yang pernah beberapa tahun tinggal di Paris sebagai imam mahasiswa Mesir yang belajar di Ibu Kota Prancis itu pulang ke negerinya dengan membawa ide-ide baru. Ia sudah mengerti bahwa untuk kemajuan suatu masyarakat kekuasaan absolut rajanya harus dibatasi. Tetapi ia belum melihat bahwa untuk itu diperlukan konstitusi model Barat. Ide konstitusi dalam Islam menurut pendapatnya terdapat dalam paham Syari'ah, yang harus dipatuhi khalifah dan Sultan. Jamal al-din al-afghani yang kuat menentang kekuasaan absolut khalifah dan Sultan-sultan di zamannya, juga melihat perlunya kekuasaan dibatasi dengan kembali ke ajaran Islam yang mewajibkan khalifah dan Sultan tunduk kepada Syari'ah.

Perlu adanya konstitusi dalam arti modern untuk membatasi kekuasaan khalifah dan Sultan dijumpai buat pertama kali pada diri Khayr al-Din al-Tunisi (1810-1889) di Tunis dan Namik Kemal (1840-1885) di Turki.

Khayr al-Din berpendapat bahwa sebab kemajuan Eropa terletak pada sistem politiknya yang berdasar pada keadilan dan kemerdekaan.<sup>35</sup> Ketidakadilan timbul sebagai akibat dari kekuasaan mutlak seorang raja dan membawa kepada kemunduran masyarakat.<sup>36</sup> Kemajuan umat Islam di masa lampau diperoleh karena kekuasaan raja Islam di waktu itu dibatasi oleh syari'ah; syari'ah menjamin hak-hak seorang baik ia beragama atau tidak beragama Islam.<sup>37</sup> Pemerintahan suatu Negara tidak boleh diserahkan kepada satu orang sungguhpun siap ia.<sup>38</sup> Prinsip-prinsip Islam ini telah diambil dan dipakai Eropa.<sup>39</sup> Negara-negara yang pernah mencapai kemajuan setinggi-tingginya adalah Negara-negara yang di dalamnya terdapat kemerdekaan yang dijamin konstitusi.<sup>40</sup>

Atas usaha-usaha disusunlah konstitusi pertama di dunia Islam dan diumumkan di Tunis pada bulan Januari 1861. Tetapi karena rakyat belum matang untuk kehidupan konstitusional, konstitusi itu dibatalkan pada tahun 1864.

Namik Kemal berpendapat bahwa sistem pemerintahan republik dan konstitusional tidaklah bertentangan dengan Islam. Di sini kelihatannya pemimpin Usmani itu teringat kembali kepada khalifah Empat besar yang kekuasaan mereka dibatasi oleh ayat-ayat al-Qur'an serta Sunah Nabi dan pemerintahan mereka bercorak republik.

Sistem konstitusi dalam bentuk modern telah diamalkan di Eropa dengan baik maka taklah perlu umat Islam mencari bentuk yang baru. Atas usahanya dan persetujuan Sultan Abdul Hamid tersusunlah konstitusi kedua di dunia Islam yang diumumkan Sultan pada tanggal 23 Desember 1876 di Istanbul. Usia konstitusi kerajaan Turki Usmani ini jauh lebih panjang dari

---

<sup>35</sup> Ashgar Ali, *Aqwam al-Masalik Fi Ma'rifat Ahwal al-Mamalik*, (Tunis, 1284), hlm. 8-9

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 10

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 11-12

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 20

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 22

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 77

konstitusi Tunis. Pemerintahan monarki yang konstitusional yang dimulai di Tunis dan di Turki itu kemudian diikuti oleh dunia Islam lainnya sehingga pada pertengahan pertama abad ke-20 boleh dikatakan seluruh dunia Islam sudah mempunyai konstitusi. Monarki absolut masa lampau dirubah menjadi monarki konstitusional.

Perubahan terakhir di abad ke-20 dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Sebagai telah disebut di atas kepala Negara Turki mempunyai dua kekuasaan. Kekuasaan yang bersifat kekudusan yang dipegangnya sebagai Sultan. Atas dasar penegertian, bahwa dua kekuasaan itu bisa dipisahkan. Atatürk mengusulkan kepada Dewan Nasional Turki untuk menghapuskan kesultanan yang disetujui Dewan pada tanggal 1923 lahirlah sebagai gantinya Republik Turki dengan Musthafa Kamal Atatürk sebagai presiden.

Dalam pada itu khalifah di Istambul masih tetap memegang kekuasaan sucinya. Terdapatlah dua kekuasaan, khalifah di Istambul dan Presiden di Ankara yang memegang kekuasaan keduniaannya. Keadaan kembali ke zaman Bani Abbas, di Baghdad ada khalifah dan di daerah-daerah ada Sultan-sultan.

Adanya dua kekuasaan di Turki ini tak bisa bertahan lama. Khalifah di Istambul juga bersikap sebagai kepala Negara, menerima duta-duta asing dan tetap menjalankan upacara-upacara kebesaran sebagai biasa di samping kegiatan-kegiatan lain. Kekuasaan khalifah di Istambul merupakan saingan bagi kekuasaan Presiden di Ankara. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, kekhalifahan sebagaimana halnya kesultanan juga dihapuskan oleh Dewan Nasional. Turki menjadi Negara republik yang murni.

Langkah Turki ini kemudian diikuti oleh dunia Islam lainnya. Indonesia sewaktu merdeka pada tahun 1945 mengambil bentuk republik, demikian juga Pakistan pada tahun 1947. Pada tahun 1952 Jamal Abd al-Nasir menggulingkan raja Faruq, dan sistem pemerintahan konstitusional dirubah menjadi sistem republik. Dunia Arab dan Islam lainnya mengikuti, dan dewasa



ini hanya sebagian kecil dari Negara-negara Islam yang masih tetap memegang sistem monarki konstitusional terutama Arab Saudi, Marokko, dan Yordania.

Loncatan sistem pemerintahan perpektif Islam dalam lintasan sejarah terus bergulir dan berkembang seiring dengan dinamika perubahan situasi dan kondisi yang melatarinya . Dari corak teokrasi era Nabi Muhammad ke corak republik demokratis era khalifah Empat Besar. Dan seterusnya bergeser ke monarki absolut pada era dinasti-dinasti kecil, baik yang dipusat kota dengan gelar khalifah, maupun di daerah yang bergelar sultan, yang pada akhirnya terhenti pada corak republic pada pertengahan kedua abad ke-20.

## PENUTUP

Islam dan sistim pemerintahan sesungguhnya adalah sebuah pemaparan teoritis yang secara umum diformulasikan dalam dua doktrin yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, bahwa keberadaan sistem pemerintahan secara universal adalah ada dan diisyratkan oleh sebagian bunyi ayatnya. Atas dasar paparan teoritis di atas, maka logis andai muncul berbagai pendapat yang menyodorkan sistem dan bentuk pemerintahah. Dan secara riil, memang klaim bentuk Negara dan pemerintahan dalam pernah ada dan berlangsung di muka bumi ini.

Namun, dalam ritme lintasan kesejarahannya, ternyata mengalami pasang surut dan tidak sedikit yang dieksekusi oleh hukum alam secara tragis. Kini tinggal puing-puing kenangan, sebagai duplikat kesejarahannya semata. Kita mayoritas beragama Islam, yang membangun Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ini adalah sejalan dengan ajaran Islam. Sekira bertentangan dengan Islam tentunya pembentukan di tahun 1945 akan mendapat tantangan keras dari para ulama dan para pemimpin Islam. Semuanya menerima Pancasila dan pemerintahan Republik Indonesia ketika Negara ini diproklamirkan di tahun 1945.

Bagi para ulama dan pemimpin Islam itu yang penting bukanlah nama. Yang penting adalah dilaksanakannya ajaran Islam dalam masyarakat. Dan ajaran Islam berjalan dalam Republik Indonesia. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini ajaran Islam lebih banyak dilaksanakan dari pada di dunia Islam lainnya. Memang kalau perbandingan hidup keagamaan umat Islam di Indonesia dengan hidup keagamaan umat Islam di dunia Islam lain tidak akan dijumpai perbedaan yang berarti. Bahkan hidup keagamaan umat Islam di Indonesia ternyata lebih bersemarak dari pada hidup keagamaan umat Islam di bagian tertentu dunia Islam. \*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, vol IV, (Mesir : Dar al-Qalam, t.t)
- Ali, Asghar, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh, 1968).
- Al-Din Khuda Bakha, Salah, *Politics In Islam* ( Lahore : Ashraf, 1954).
- Al-Maudi, Abu ‘Ala, *Islamic Law and Constitution*, (Lahore, 1960).
- Al-Maududi, Abu Ala, *Islam and Socialism*, (Lahore : Working The Basher Muslim Library, t.t).
- Al-Rayes, M.D. *Al-Nazariat al-Siasah al-Islamiyah*, (Kairo : 1957).
- Al-Zamahsyari, *Al-Kasyaf*, vol I, (Bairut : Dar al-‘Ilm, t.t.), hlm. 404
- Darwajah, Azzah, *Al-Dustûr al-Qur’ani Fî Syu’ûn al-Hayyah*, (Kairo : Dar al-Fikr, t,t),
- Darwajah, Azzah, *Al-Is lam wa Usul Al-Hukum*, (Kairo : Isa al-bab al-Halabi, 1992.
- Hasaballah, Ali, *Uhsul Al-Tasyri’ Al-Islami*, ( Kairo : Dar Al-Ma’arif, 1964.
- Katsir, Ibn, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim*, vol II, (Mesir : Dar al-Fkr, t.t),
- K. Hitti, Philip, *History of The Arabs*, ( London, 1964, ).
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushu al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956).

